



POLICY BRIEF

Dr. Yunardi, S.KM. M. Kes

Fungsional Perencana Ahli Madya Bappeda Kabupaten Bungo

ARAH KEBIJAKAN DAN TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024-2026

A. Latar Belakang

UNDP memandang tingkat kemiskinan adalah suatu problematika multidimensi yakni tidak hanya sebatas pada kekurangan pendapatan dan sumber daya ekonomi. Demikian juga perkataan Ali r.a. ketika seseorang mengalami kemiskinan harga dirinya menjadi turun, banyak kebutuhan dunianya tidak bisa ia capai, tidak jarang membuatnya menjadi kufur nikmat atau melupakan nikmat yang sudah diterima sehingga menggiringnya pada kekafiran.

Persentase penduduk miskin Kabupaten Bungo meningkat dalam periode tahun 2019 hingga 2021 dari sebesar 5,78% menjadi 6,23%, peningkatan tersebut terjadi dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Peningkatan persentase penduduk miskin tersebut terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Kondisi mulai membaik pada tahun 2022 menjadi 5,38% (20.960 jiwa) dan kembali turun tahun 2023 menjadi 5,29% (20.650 jiwa).

B. Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Jangka Menengah Kabupaten Bungo

Penjelasan atas kemiskinan menjadi isu strategis di Kabupaten Bungo yaitu bahwa pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan dapat diwujudkan jika terbangun kondisi masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kesejahteraan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang berkualitas. Secara khusus kelompok rentan terlindungi dari resiko ancaman kerentanan sosial ekonomi. Oleh karena itu sub isu-isu strategis yang menjadi tantangan isu pembangunan kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan adalah: (1) penanggulangan kemiskinan; dan (2) perlindungan dan ketahanan sosial.

Masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, bukan hanya pada ukuran pendapatan, tetapi juga menyangkut: (1) kerentanan dan kerawanan masyarakat untuk menjadi miskin, (2) ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga, dan (3) ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Isu utama pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bungo adalah bagaimana menurunkan jumlah penduduk miskin dan mencegah timbulnya orang miskin baru. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa kemiskinan adalah sebuah lingkaran yang terus berulang akibat ketidakmampuan seseorang untuk meningkatkan kualitas dirinya serta terbatasnya kesempatan yang dimilikinya untuk memperbaiki kesejahteraan hidupnya sehingga terus terjebak dalam kemiskinan, maka isu terkait pengentasan kemiskinan yang akan diangkat untuk pembangunan selama tiga tahun ke depan adalah masih harus ditingkatkannya kualitas penanganan kawasan kumuh, ketersediaan infrastruktur dasar (air bersih, air minum dan sanitasi), ketersediaan perlindungan sosial dan kualitas pembangunan desa.

Dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, penurunan kemiskinan menjadi bagian dari tujuan ke-5 yaitu Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berdaya. *Maksudnya adalah mengupayakan masyarakat yang unggul, tangguh, dan memiliki kontribusi dalam rangka peningkatan daya saing dan kemandirian daerah guna mendukung tujuan pembangunan daerah.* Dan pada sasaran pembangunan dipertegas pada sasaran ke-9, dengan indikator Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Pemberdayaan dengan pengertian *“Mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang sesuai dengan standar kehidupan masyarakat melalui pengelolaan potensi berbasis pada kearifan lokal, adat istiadat dan penguatan kelembagaan masyarakat”*. Adapun tujuan sasaran serta target jangka menengah dalam penurunan angka kemiskinan dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Tujuan dan Sasaran Daerah RPD Kabupaten Bungo Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Capaian		
					2024	2025	2026
Peningkatan Kondisi Standar Kehidupan	Mencapai Standar Kehidupan	Tingkat Kemiskinan	%	5,38	5,3	5,2	5,0

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2023	Target Capaian		
					2024	2025	2026
		Kepesertaan JKS Ketenagakerjaan	%	46,0	54	55,6	60
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,23	5,1	5,0	4,9
	Birokrasi	Indeks SPBE	Angka	1,9	2,6	2,6	2,9
		Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Angka			3,7	3,8
Peningkatan Derajat Kesehatan	Sehat untuk Semua	UHH	Tahun	72	73	73,7	74
		Stunting	%	13,7	12	11	10
		Penanganan TBC		90	95	100	100
		Kepesertaan JKN		85	90	95	98
Peningkatan Kualitas Pendidikan	Pendidikan	Persentase satuan pendidikan kopetensi minimum tk nasional	%			63,69	64
		Literasi Membaca		55,4	56,3	57,71	59
		Numerasi				8,39	
Peningkatan Kualitas kesetaraan Gender	Keluarga berkualitas	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga		58,2	59,3	61,43	62,0
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)		0,52	0,5	0,45	0,4
		PDRB Edkonomi Kreatif	%	6,6	6,8	7,0	7,2
		Tingkat Inflasi	%	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1	2,5 ±1
		Indeks daya saing daerah		2	2	2	2
		Indeks Pembangunan Manusia		73,57	74,50	77,0	81,0
Peningkatan Pangan	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan	Ketersediaan energi	KKal	2.943	3000	3100	3200
Minitgasi Bencana	Bencana	IRB	Sedang/berat	sedang	sedang	sedang	ringan
	Meningkatnya Cakupan Rumah Layak Huni	Cakupan Ketersediaan rumah layak huni	%				

Mengamati arah kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bungo dapat ditetapkan tema sebagai berikut: Tahun pertama (2024) dengan tema **“Peningkatan perekonomian melalui peningkatan daya saing daerah untuk Penghapusan kemiskinan ekstrim dan pengurangan pengangguran”**, Adapun fokus program pada:

- a. Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan;
- b. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha;

- c. Penguatan koordinasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak mengenai bantuan RTLH;
- d. Peningkatan akses air minum dan sanitasi;
- e. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun kedua (2024) dengan tema “Pemantapan kondusivitas wilayah untuk mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pertanian” yaitu pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:

- a. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru;
- b. Meningkatkan cakupan penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- c. Penanganan RTLH secara terpadu;
- d. Peningkatan keterampilan berusaha dan fasilitasi informasi lapangan pekerjaan.

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun ketiga (2025) dengan tema “**Pemantapan perekonomian daerah dengan peningkatan pemanfaatan potensi daerah**” yaitu pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:

- a. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru;
- b. Meningkatkan peran serta aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
- c. Perluasan penanganan RTLH.

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan pada tahun ketiga (2026) dengan tema “**Pemerataan pembangunan wilayah, Zero Kemiskinan Ekstrem**” yaitu pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:

- a. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru;
- b. Memperkuat kelembagaan kesejahteraan sosial;
- c. Meningkatkan peran para pemangku kepentingan dalam program-program pengentasan kemiskinan.

C. Rekomendasi

1. Bappeda harus memfasilitasi untuk kajian mendalam sehingga dari masing-masing OPD memahami tugas pokok dan fungsi permasalahan kemiskinan sehingga program dan kegiatan menyentuh akar rumput persoalan kemiskinan.
2. Perlu pembahasan dan analisis mendalam berbagai pihak (Ahli, pemerintah, DPRD, Perusahaan, dan kelompok masyarakat) untuk

- mencari menyelesaikan masalah (peran masing-masing stakeholders, kajian determinan faktor kemiskinan dan pokok-pokok pikiran legislatif terutama non fisik)
3. Perlu dibentuk Tim Khusus terkait pendataan, dan dipastikan data ter-update minimal 1 kali setahun sebelum pelaksanaan Musrenbang.
 4. Semua OPD, perusahaan dalam menyusun lokus dan prioritas harus merujuk kepada data yang sudah disepakati.
 5. Penentuan target pada arah kebijakan yang penulis ambil dari dokumen yang ada, perlu dikaji secara metodologi *forecasting* bukan estimasi sederhana tanpa memperhitungkan kemampuan fiskal dan sumber daya manusia.
 6. Untuk mewujudkan kondisi yang direfleksikan dengan indikator tersebut perlu transformasi inovasi, transformasi, sumber daya, termasuk transformasi integritas dan komitmen

D. Penutup

Penulisan artikel ini ditulis dalam rangka menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Bungo Tahun 2022-2026. Untuk itu besar harapan penulis agar artikel ini dapat dibaca oleh berbagai pihak (Pejabat struktural, pejabat fungsional, para pimpinan organisasi, kelompok masyarakat, perusahaan dan pemerhati masalah kemiskinan) untuk dapat memberi masukan yang berguna dalam penyusunan dokumen RPKD Kabupaten Bungo.

Khusus kepada kawan-kawan teman sejawat perencana dan analisis kebijakan berkenan membaca dan memberi masukan terhadap artikel ini, dan *tulislah gagasannya apa yang terbaik untuk Kabupaten Bungo*.

Wassalam, barokallahu fiikum

Muara Bung, 13 September 2029